



**BAHAN KULIAH KETAHANAN PANGAN
DUA KALI PERTEMUAN: 8 DAN 15 JANUARI 2025**

Program MBG, Susu Gratis dan Keragaman Pangan Lokal

**Oleh Posman Sibuea
Pengampu Mata kuliah Ketahanan Pangan
Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas**

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 patut didukung semua pihak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jika program MBG sudah berjalan, Badan Gizi Nasional akan membelanjakan Rp 1,2 triliun/hari untuk investasi sumber daya manusia dan sekitar Rp 800 miliar/hari untuk belanja program MBG.

Program MBG dan susu gratis dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia akan menghidupi spiritualitas tema Hari Pangan Sedunia 2024 *Right to foods for a better life and a better future* atau “Hak atas pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik” - diperingati pada bulan Oktober 2024 - untuk mengingatkan "Jangan tinggalkan siapapun" (LNOB, *Leave No One Behind*). Sebuah komitmen tegas dari semua Negara Anggota PBB, termasuk Indonesia untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya.

Hak atas Pangan

Selama lima tahun terakhir krisis pangan yang kian pelik menghampiri negeri agraris Indonesia karena dipicu perubahan iklim global, krisis pupuk dan perdagangan pangan yang kian liberal. Dampaknya, pemerintah belum mampu memenuhi hak atas pangan (*right to foods*) yang berbasis sumber daya lokal kepada rakyatnya.

Kini tidak terhindarkan, pasar pangan di Indonesia kian dibanjiri pangan impor yang harganya relatif lebih murah. Hal ini membuat usaha kecil di bidang pangan lokal kian terpuruk dan petani swadaya mengalami proses pemiskinan. Meski teknologi pertanian di era globalisasi ini makin maju, petani lokal belum mampu mengaksessnya dengan baik. Mutu produknya kalah bersaing dengan pangan impor.

Pembangunan lumbung pangan dalam model *food estate* di sejumlah daerah belum mampu mencegah bangkrutnya usaha pertanian lokal. Ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal belum dikelola melalui lumbung pangan beragam dan bergizi untuk memberi solusi.

Sejatinya, ketersediaan pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) di lumbung-lumbung pangan di perdesaan, selain mengurangi pangan impor (*food mile*) yang sangat mahal, menjaga keamanan pangan juga membuka lapangan kerja baru. Program ini memberikan pilihan leluasa untuk merancang kebijakan pengelolaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan dan bermuara pada kekuatan kedaulatan pangan (*food sovereignty*).

Masyarakat yang masih mengalami defisit konsumsi pangan beragam akan semakin sulit mendapatkan asupan gizi seimbang di tengah penurunan daya beli masyarakat. Pemberian MBG sebagai bantalan gizi kepada 82,9 juta jiwa anak sekolah harus tepat sasaran

dan tepat bahan baku, yakni pangan lokal untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Harapan ini untuk menghindari penurunan mutu gizi makanan yang dikonsumsi dan mencegah penurunan mutu sumber daya manusia anak bangsa di masa datang serta melibatkan petani lokal..

Tingkat konsumsi protein hewani, selain protein nabati yang berasal dari kelompok kacang-kacangan dan biji-bijian harus mendapat perhatian karena memberi arti penting dalam tata kelola pangan yakni untuk memenuhi hak-hak masyarakat di bidang pangan dan gizi. Khususnya anak balita dan ibu hamil terlindungi dari defisit pangan dan gizi untuk menahan laju peningkatan angka *stunting* (tengkes, betubuh pendek) di tengah bangsa ini.

Bahkan ketika saat ini kita memasuki krisis pangan global, pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di bidang pemenuhan gizi harus dihindari. Presiden Prabowo Subianto patut berkerja keras menyusun langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan mengakhiri krisis pangan global berkelanjutan. Restriksi pangan yang kian marak dilakukan sejumlah negara pengekspor komoditas pangan menjadi alasan utama membangun lumbung-lumbung pangan di setiap desa di tanah air untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* pada balita dan penyedia bahan baku MBG dari produk pangan lokal.

Desa B2SA

Dampak krisis pangan global ditengarai akan menetaskan proses *lost generation* atau “generasi yang hilang”. Kecerdasan anak yang mengalami *stunting* terampas oleh defisit pangan yang kembali bersemayam di negeri agraris ini dan mestinya disikapi sebagai ancaman ketahanan nasional yang amat serius. Pemerintah patut menginisiasi strategi baru pengelolaan desa untuk menghadapi krisis pangan. Kunci utamanya ialah membangun desa

pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) sebagai pilar ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, program MBG harus terus dilanjutkan melalui perwujudan desa B2SA yang menyediakan bantalan pangan sumber protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Landasan kebijakannya sudah jelas, yaitu Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 20 persen atau Rp 13,6 triliun Dana Desa 2022 untuk ketahanan pangan (A. Halim Iskandar, 2022).

Kebijakan yang merekognisi ketahanan pangan desa ini akan memadukan proses pertanian *on farm*, pasca-panen, dan proses primer sederhana yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau koperasi setempat. Keberhasilannya dapat mempercepat pemenuhan gizi kepada kelompok 1.000 hari pertama dalam kehidupan (HPK) yang diyakini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Dampak kurang gizi sejak masa kandungan hingga anak berumur dua tahun tidak kelihatan dalam jangka pendek, tapi ketika sudah di usia dewasa berpotensi terkena berbagai penyakit.

Data terkini Kemenkes menunjukkan persentase penderita *stunting* dan *wasting* masih tinggi, meski sudah banyak upaya dilakukan pemerintah menurunkan. Alan Berg, sekitar 35 tahun lampau dalam bukunya *Peranan Gizi dalam Pembangunan Nasional* mengingatkan program perbaikan gizi harus dilihat sebagai investasi SDM. Setiap dollar yang digunakan untuk perbaikan gizi misalnya akan memberikan keuntungan puluhan dollar, sebab angka *droop out* sekolah yang amat merugikan dapat dicegah.

Masalah gizi di Indonesia bukan semata disebabkan oleh kurangnya produksi pangan. Persoalan utama selain kemiskinan yang memicu tumpulnya daya beli *wong cilik*

juga didorong oleh faktor perilaku masyarakat yang bias dalam memilih, mengolah, dan menyajikan makanan. Pengetahuan mereka tentang gizi keluarga relatif masih kurang sehingga membutuhkan literasi pangan dan gizi melalui pangan B2SA, seperti termaktub dalam Perpres Nomor 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Secara faktual, di berbagai daerah masih kerap ditemukan kasus gizi kurang meski secara ekonomi memiliki rupiah untuk membeli makanan. Namun, minimnya pemahaman terhadap pangan B2SA mendorong munculnya kembali kasus gizi kurang dan menjadi sebuah fenomena puncak dari gunung es. Persoalan ini harus segera ditangani untuk menyelamatkan gunung esnya, yaitu janin, ibu hamil dan bayi dengan usia 1.000 hari pertama, sebelum mereka menjadi generasi hilang (*lost generarion*). Ketika harga pangan semakin menjauh dari daya beli masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan, kecukupan gizi harus dipastikan ketersediaannya.

Produk susu

Hasil pemilihan presiden (pilpres) belum resmi diumumkan oleh KPU, namun dari hasil hitung cepat (*quick count*) sejumlah lembaga survei menunjukkan pilpres satu putaran dan pemenangnya ialah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, behasil mendulang suara di kisaran 56 – 58 persen. Jika hasil hitungan KPU tidak berbeda jauh dengan *quick count*, Prabowo- Gibran dipastikan menjadi pimpinan baru republik ini (Sibuea, 2024, *Kompas*, 19/03/2024, https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/17/susu-gratis-dari-mana-susunya?open_from=Search_Result_Page).

Tak pelak lagi, masyarakat akan menagih janji-janji saat kampanye, salah satunya adalah program susu gratis dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk Indonesia Emas 2045. Di tengah kondisi persusuan nasional yang sedang tidak baik-baik saja, program bagi-bagi susu gratis ini menyisakan sebuah pertanyaan, darimana sumber susunya? Prabowo pernah menyebutkan bahwa susu berasal dari sapi langsung karena mutunya lebih baik dibanding susu kemasan pabrik.

Namun, berdasarkan data dari BPS (2022), produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya mencapai 968.980 ton atau sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Meski mengalami kenaikan produksi per tahun, belum bisa mengejar angka kebutuhan susu segar. Sisanya dipenuhi dengan impor, sekitar 80 persen dari kebutuhan.

Konsumsi susu masih rendah

Tingkat konsumsi susu penduduk Indonesia masih rendah yaitu sekitar 16,0 kilogram per tahun. Sejatinya, kebutuhan susu terus meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang saat ini sudah mendekati 280 juta jiwa. Ini artinya pengembangan peternakan sapi perah lokal secara lebih professional menjadi kata kunci mengingat peluang pasar susu nasional terbuka lebar seiring tumbuhnya kebutuhan masyarakat.

Minimnya produksi susu nasional dipicu dua hal, yakni jumlah populasi sapi perah yang tak mencukupi dan rendahnya produktivitas sapi perah itu sendiri. Dari sisi produktivitas, sapi perah di Indonesia rata-rata hanya memproduksi 10 liter per ekor per hari. Jauh dari produksi susu sapi negara maju yang bisa mencapai 30 liter bahkan 50 liter per hari. Sapi-sapi yang produktivitasnya rendah itu mayoritas dikelola oleh peternak kecil

dengan pengelolaan sapi yang masih tradisional. Pada poin inilah pilar swasembada susu nasional harus diberi penguatan.

Produksi susu di Indonesia, sebagian besar dihasilkan peternak rakyat dengan skala usaha 1-3 ekor sapi perah. Skala usaha ternak ini kurang ekonomis karena keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan susu hanya cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup peternak. Namun, sejumlah perusahaan susu nasional yang menerapkan manajemen ternak dan teknologi yang baik bisa memiliki produktivitas susu 24 liter bahkan 34 liter per hari.

Tingkat konsumsi susu yang masih rendah harus diisi dengan mengimpor susu untuk menutupi defisit ketersediaan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memberi batas rendah untuk konsumsi susu di bawah 30 kg per kapita per tahun. Sementara batas sedang untuk konsumsi susu mencapai 31-150 kg per kapita per tahun dan di atas itu dianggap sebagai konsumsi tinggi.

Laju konsumsi susu di republik agraris ini yang masih tergolong rendah berdasarkan standar dari FAO harus ditingkatkan. Pasalnya susu merupakan bahan pangan yang kaya kandungan gizi. Ia menjadi sumber protein berkualitas, sumber kalsium yang menguatkan tulang, dan diyakini dapat memperbaiki gizi anak balita untuk tidak terpapar *stunting* alias gagal tumbuh.

Program kerja capres-cawapres yang menjanjikan pemberian susu gratis patut diberi apresiasi. Namun, konsekuensi logisnya kran impor bakal dibuka. Lantas, siapa yang diuntungkan? Tentu saja para importir susu dan sapi perah. Rencana impor 1,5 juta ekor sapi perah untuk meyakinkan program susu gratis layak dikritisi. Bahkan dalam dua tahun,

akan ada tiga juta ekor sapi perah yang dapat memproduksi susu untuk kebutuhan susu gratis bagi 82 juta anak.

Rencana besar importasi ini sangat bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk mengurangi barang impor. Ia berulang kali mengungkapkan kekesalannya akibat maraknya barang impor di Indonesia. Bahkan ia pernah menyebut bahwa hobi impor barang sebagai sebuah kebodohan. Paling tidak, itulah kekesalan yang sangat dalam karena pemerintah selalu tergantung pada produk pangan impor di tengah melimpahnya potensi sumber bahan pangan lokal.

Percepatan swasembada

Mendorong penguatan swasembada susu guna meningkatkan konsumsi susu menjadi catatan penting bagi pemerintahan hasil pemilu 2024. Siapapun yang keluar sebagai pemenangnya patut melakukan percepatan swasembada susu sapi 2030. Sekedar menyebut contoh tingkat konsumsi susu di Filipina sudah di angka 23 kg per kapita per tahun, lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Adapun Thailand mencapai 44 kg per kapita per tahun dan Malaysia 50 kg per kapita per tahun.

Jika masyarakat Indonesia mengonsumsi setidaknya 30 kg per kapita per tahun saja, kebutuhan susu nasional bisa melonjak menjadi lebih dari 8 juta ton per tahun. Pasar ini seharusnya menjadi ruang yang menjanjikan bagi peternak sapi perah lokal.

Niat pemerintah untuk swasembada susu sudah berulang kali diserukan. Saatnya pemerintah membuat regulasi baru dan membenahi lebih serius usaha penggemukan dan peternakan sapi lokal guna mamacu kinerjanya supaya bisa menyediakan susu berkualitas

untuk kebutuhan masyarakat. Upaya ini bisa tercapai bila pemerintah memberi subsidi yang memadai sehingga produksi dan produktivitas ternak sapi perah dapat ditingkatkan.

Langkah antisipasi lewat pemberdayaan peternak kecil dan menengah menjadi agenda jangka panjang yang amat penting. *De facto*, peternak kecil yang jumlahnya mencapai hampir 80 persen dari seluruh usaha peternakan yang ada merupakan pemasok susu terbesar di Indonesia. Pengelolaan usaha peternakan sapi perah lokal yang diintegrasikan dengan perkebunan kelapa sawit menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan ke depan. Saat ini luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah sekitar 16 juta hektar. Jika setiap hektar bisa menghidupi dua ekor sapi maka Indonesia akan swasembada tidak saja susu tetapi juga daging sapi dalam waktu tidak lama.

Mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi perah akan dapat mengontrol secara signifikan jumlah populasi sapi perah yang saat ini masih bertengger di angka 600 ribu ekor. Dengan mengucurkan bantuan modal lewat kredit bunga rendah diharapkan petani sawit swadaya dapat menghasilkan susu sapi bermutu baik pula.

Selama ini peternak lokal sapi perah belum sepenuhnya menghasilkan susu baik secara kualitas maupun kuantitas, sebab terkait dengan masalah pengadaan bibit dan pola pemeliharaan yang dilakukan masih konvensional. Persoalan ini ini patut dijumpatani dengan mentransfer teknologi maju agar peternakan sapi perah nasional lebih kompetitif. Saat ini bioteknologi peternakan amat pesat perkembangannya dan mampu menghasilkan ternak transgenik yang unggul guna peningkatan populasi ternak.

Langkah antisipasi penting lainnya pemerintah harus memberi prioritas terhadap pengembangan bioteknologi peternakan melalui kerjasama dengan pemilik modal swasta

besar. Pengembangan ini membutuhkan aturan main yang jelas dan memihak rakyat sehingga saling menguntungkan antara pemilik modal dan peternak lokal. Implikasi upaya ini akan mampu mengatasi kekurangan susu dan mengontrol tingkat konsumsinya di Indonesia guna menepis dampak gizi buruk di tengah masyarakat.

Melakukan percepatan swasembada susu secara berkelanjutan dan lebih serius ialah bentuk dukungan pemutusan mata rantai susu sapi impor. Pemerintahan hasil pemilu 2024 harus segera mengeluarkan Blue Print Persusuan Nasional 2024 – 2034 dengan integrasi perkebunan kelapa sawit. Harapannya, pada tahun 2029, target pemenuhan kebutuhan susu nasional dan program susu gratis dapat berasal dari sapi perah dalam negeri.

Untuk itu, rencana aksi perlu disusun untuk mendorong penguatan swasembada susu agar produktivitas sapi perah bisa mencapai 25 liter per hari, konsumsi susu meningkat menjadi 35 liter per kapita per tahun, dan populasi sapi perah menjadi 2,5 juta ekor. Target ini bisa tercapai lewat peningkatan populasi sapi perah terintegrasi sawit dengan penerapan *good farming practices* (GFP), pemberian insentif investasi berupa keringanan pajak kepada peternak lokal, perbaikan genetik sapi dan perbaikan kualitas pakan sapi perah.

Penutup

Masalah konsumsi susu dan protein hewani yang masih rendah serta kekurangan gizi harus segera diatasi satu per satu agar sejalan dengan paradigma sehat menuju Indonesia Emas 2045. Potensi bahan pangan lokal sangat beragam dan bergizi dalam jumlah yang sangat besar. Keberagaman ini bisa digunakan untuk memasok bahan baku untuk program MBG jika pemerintah berhasil mewujudkan lumbung pangan B2SA di setiap desa.

Ke depan, mutu SDM anak bangsa harus semakin baik untuk membawa warga negeri ini menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih cerdas. Pangan beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal menjadi pilar kedaulatan pangan untuk mengurangi berbagai pangan impor secara signifikan. Muaranya adalah MBG berbuah manis untuk Indonesia Emas 2045.

Posman Sibuea, Guru Besar Teknoagroindustri Pangan di Prodi Teknologi Hasil Pertanian dan Dekan Fakultas Pertanian Unika Santo Thomas Medan.

